

7 April 2005

**10. Ulasan: *Pembayaran jasa DAS dan air sebagai hak asasi manusia – adakah yang bertentangan?***

*(Review: Payments for watershed services and water as a human right - is there a conflict?)*

Biaya air yang juga mencakup biaya perlindungan jasa DAS pada dasarnya merupakan bagian dari suatu perubahan kebijakan yang umum terjadi, yaitu dari penekanan pada pengembangan sumber-sumber air yang baru, menjadi perlindungan sumber-sumber air yang ada dan realokasi air yang tersedia serta penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sehubungan dengan hal tersebut muncul suatu pertanyaan kunci yang berkaitan dengan masalah kebijakan yaitu, bagaimana mengalokasikan air di antara penggunaan-penggunaan yang saling bersaing. Alokasi air yang hanya didasarkan kepada keinginan untuk membayar merupakan suatu kontroversi karena hal itu dapat menyebabkan kelompok masyarakat yang kurang mampu membayar tidak memperoleh air yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mengingat pentingnya peranan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang paling mendasar, maka penetapan biaya air yang didekati dari keinginan untuk membayar dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan yang akan berakibat kepada pengingkaran semua hak asasi manusia, tanpa mempertimbangkan apakah ada pengakuan formal terhadap hak setiap individu terhadap air. Jelas hal ini merupakan suatu hal yang tidak etis, dan dengan mudah akan menimbulkan kontroversi baik di negara-negara maju ataupun di negara-negara berkembang.

Pada konstitusi dan undang-undang tentang air yang baru, Afrika Selatan merupakan negara pertama yang menyatakan pengakuan secara eksplisit terhadap hak asasi manusia maupun hak lingkungan terhadap air. Hal ini dilakukan dengan mencadangkan sejumlah air bagi kebutuhan manusia yang disediakan secara gratis oleh penguasa air lokal, dan juga untuk kebutuhan lingkungan, seperti yang ditetapkan melalui pengembangan strategi pengelolaan daerah tangkapan air. Pada prinsipnya strategi ini dibiayai oleh para pengguna air melalui biaya-biaya yang dikenakan pada penggunaan-penggunaan lainnya, termasuk penggunaan tanah yang dapat menurunkan aliran air. Suatu kajian yang dilakukan oleh Mehta dan Ntshona (2004) menunjukkan bahwa dalam prakteknya kapasitas penguasa air lokal untuk mengimplementasikan program tersebut sangat terbatas, dan pembebasan biaya bagi orang-orang tertentu seringkali berlanjut walaupun biaya tersebut tetap harus dikeluarkan untuk menutupi biaya operasional. Pembebasan biaya ini ternyata terkait dengan terjadinya penyakit kolera dan penyakit saluran pencernaan karena mereka yang tidak mampu membayar terpaksa menggunakan air dari sumber yang terpolusi. Jumlahnya terus meningkat karena secara bersamaan kebijakan pengendalian fiskal yang dilaksanakan telah menyebabkan terbentuknya privatisasi sebagai sumber keuangan bagi penguasaan air, disamping menyebabkan pengurangan bantuan dan subsidi yang pada mulanya merupakan sumber dana utama untuk membiayai pencadangan air.

Sementara itu di lain tempat, pengalaman tentang privatisasi air telah memicu ketakutan dan ketidakpercayaan pasar terhadap jasa air dan jasa DAS. Kasus yang terparah terjadi di Cochabamba Bolivia, di mana privatisasi telah menyebabkan terjadinya hambatan karena tagihan air per bulan meningkat menjadi dua atau bahkan tiga kali lipat dari yang biasanya dibayarkan. Masalah yang serupa terjadi di negara-negara Andean seperti juga di tempat-tempat lainnya, merupakan sejarah bahwa

pelanggaran batas oleh pemerintah setempat atau oknum-oknum berkuasa lainnya terhadap lembaga manajemen air tradisional yang ada merupakan hal yang kritis bagi ketahanan pangan dan kehidupan di pedesaan. Pembayaran untuk jasa DAS memang merupakan hal yang relatif baru tetapi peranan pasar dalam pengalokasian air pasti akan dijumpai dan bukan hanya merupakan masalah semantik. Akan tetapi, harus diingat bahwa pasar tidak lebih dari serangkaian peraturan yang mengatur pertukaran barang dan jasa. Dalam kaitan tersebut, privatisasi hanya merupakan salah satu pendekatan yang dapat ditempuh, dan tidak harus merupakan yang paling sesuai untuk semua pengguna dan penggunaan. Aturan-aturan pasar tersebut akan bervariasi dan tergantung pada hak-hak apa saja yang diakui dan diberdayakan oleh kedua pihak, sebagaimana halnya dengan karakteristik barang atau jasa yang akan dipertukarkan. Air dan juga jasa DAS, tidak dapat dibeli dan dijual sebagaimana halnya sepotong roti atau sebidang tanah. Transaksi itu sendiri biasanya akan memerlukan negosiasi tentang hak dan kewajiban yang lebih spesifik dari semua pihak yang terlibat.

Hak akan air biasanya didefinisikan sebagai "hak untuk mendapatkan air dengan mutu yang memadai dan dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar," Pertanyaannya adalah definisi tersebut mencakup kebutuhan apa saja. Format deklarasi biasanya tidak dinyatakan secara gamblang dan meninggalkan berbagai isu yang harus dipecahkan dalam tahap implementasi. Namun walau bagaimanapun, menurut Gleick (1999) suatu jaminan formal untuk mendapatkan air jernih dapat digunakan sebagai justifikasi untuk memberikan prioritas dalam mengalokasikan air untuk penggunaan-penggunaan tertentu dibanding penggunaan lainnya. Sementara pendapat lain menganjurkan agar hal tersebut dilengkapi dengan pendekatan ekosistem agar peranan jasa DAS dalam menjamin akses masyarakat terhadap air dapat dipahami (Scanlon et al, 2003).

Sebagai penutup, akses terhadap air akan tergantung pada kekuatan lembaga lokal dan pada kapasitas serta kekuatan relatif pihak-pihak yang terlibat, untuk menegosiasikan dan memecahkan konflik yang ada. Pengenalan lembaga-lembaga yang ada dan pengembangan jaringan kerja sebagai sumber dukungan politis dapat menjadi titik awal yang baik. Menegosiasikan rincian kesepakatan-kesepakatan DAS secara spesifik dan menjelaskan bagaimana cara yang akan diterapkan untuk meningkatkan pengiriman jasa-jasa DAS dengan semua pilihan yang ada didalam tabel, juga merupakan suatu pertimbangan yang baik untuk dirundingkan.